



Media Title	Bisnis Indonesia	
Date	11 Oktober 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	1	Article Size
Journalist	Dara Aziliya	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

# Hutama Karya Tunggu Izin SPV Dari Menteri BUMN

Dara Aziliya  
redaksi@bisnis.co.id

DELI SERDANG—PT Hutama Karya sebagai pemegang mandat dari pemerintah siap merealisasikan pembangunan dua dari total empat ruas Jalan Tol Trans Sumatra, yakni ruas Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya.

Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra mengatakan pengerjaan konstruksi dua ruas jalan tol itu dapat dimulai segera setelah perusahaan mendapatkan izin *special purpose vehicle* (SPV). Saat ini, pengajuan izin telah berada di meja Kementerian BUMN dan tinggal menunggu kepulangan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang kini tengah berada di China.

"Kita harap [izin] SPV dapat turun pekan depan. Kalau sudah ada izin, baru bisa mulai *clearing* lahan, urus BPJT [Badan Pengatur Jalan Tol], menetapkan kontraktor. Diharapkan sebelum akhir tahun pengerjaan sudah bisa dimulai," ungkap Gusti di Medan, Jumat (10/10).

Jika konstruksi sudah dimulai, Gusti meyakini pembangunan kedua jalan tol itu dapat selesai dalam kurun waktu dua tahun, asalkan pemerintah daerah dapat menjaga komitmen kerja sama.

Adapun, empat proyek yang dimandatkan pemerintah pada Hutama Karya sesuai Perpres No. 100/ 2014 yaitu ruas Medan-Binjai, ruas Palembang-Indralaya, ruas Pekanbaru-Dumai, dan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dengan panjang masing-masing ruas 17 km, 22 km, 126 km, dan 139 km serta nilai masing-masing investasi yaitu Rp1,6 triliun, Rp3,6 triliun,

Rp14,2 triliun, dan Rp16,9 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan ruas Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya harus menjadi prioritas karena merupakan jalur yang paling padat aktivitasnya. "Secara bisnis, makin padat aktivitas, makin tinggi produktivitasnya," katanya.

Atas alasan ini, Chairul meminta dua proyek tersebut didahulukan pengerjaannya. Dia menambahkan, dua proyek berikutnya akan segera direalisasikan jika dua proyek awal telah selesai atau terkonsolidasikan.

## PORSI PEMBIAYAAN

Untuk dua proyek prioritas dengan nilai total Rp5,2 triliun, Gusti mengaku Hutama Karya memiliki dana internal yang dapat digunakan. Sedangkan untuk total kebutuhan investasi sebesar Rp36,3 triliun, Hutama Karya dapat menempuh sejumlah cara lain.

"Medan-Binjai ini modalnya sudah cukup, tinggal cari pinjamannya. Sejauh ini sudah dibicarakan dengan Sarana Multi Infrastruktur dan Pusat Investasi Pemerintah," jelas Gusti.

Dia menambahkan porsi pembiayaan antara kas internal dan pinjaman tak harus 30:70 karena tugas pembangunan proyek ini merupakan perintah khusus dari pemerintah.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan proses pembiayaan dapat melalui penyertaan modal negara, penerusan pinjaman pemerintah, penerbitan obligasi, pinjaman Hutama Karya atau bentuk pendanaan lain dari Badan Investasi Pemerintah lainnya. □